



Peningkatan Peran JDIH Desa Dalam pemberian Layanan Publik Digital yang Responsif

JDIH BIRO HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH

Disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengelola JDIH Kab. Batang
Desa Beji, Kec Tulis, 20 November 2023

SELAMAT JDIH KAB BATANG

PENERIMA PENGHARGAAN

ANGGOTA JDIH TERBAIK TAHUN 2023

TINGKAT KABUPATEN

- 1 KABUPATEN BANYUWANGI
- 2 KABUPATEN BATANG
- 3 KABUPATEN SEMARANG
- 4 KABUPATEN WONOSOBO
- 5 KABUPATEN MAGELANG

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor M.HH - 02.HN.03.05 Tahun 2023
tentang Penetapan Anggota JDIH Terbaik Tahun 2023



www.jdihn.go.id

- 1 **DASAR HUKUM JDIH**
- 2 **KEBIJAKAN NASIONAL JDIH**
- 3 **URGENSITAS JDIH**
- 4 **KEBIJAKAN JDIH PROV JATENG**
- 5 **PENGELOLAAN JDIH DALAM
MENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK**

1. DASAR HUKUM JDIH



DASAR HUKUM PENGELOLAAN JDIH

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | UU Nomor 14 Tahun 2008 | tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 2. | UU Nomor 12 Tahun 2011 | tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan |
| 3. | Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 | tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional |
| 4. | Permendagri Nomor 2 Tahun 2014 | tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah |
| 5. | Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 | Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum |
| 6. | Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 | Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah |
| 7. | Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2023 | Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah |

2. KEBIJAKAN NASIONAL JDIH



Indonesia Negara Hukum

(UUD Ps. 1 ayat 3)

TUJUAN

SUPREMASI HUKUM
(MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR)
semua aktivitas dalam kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara
harus berdasarkan hukum

Pembangunan hukum nasional
menghasilkan puluhan ribu
peraturan per-uu

Konsekuensi

MASALAH REGULASI:

- *hyper-regulation;*
- *Overlapping;*
- *Inconsistency;*
- *Multitafsir;*
- *High Cost Economy*
- *Tidak efektif*

Kebijakan

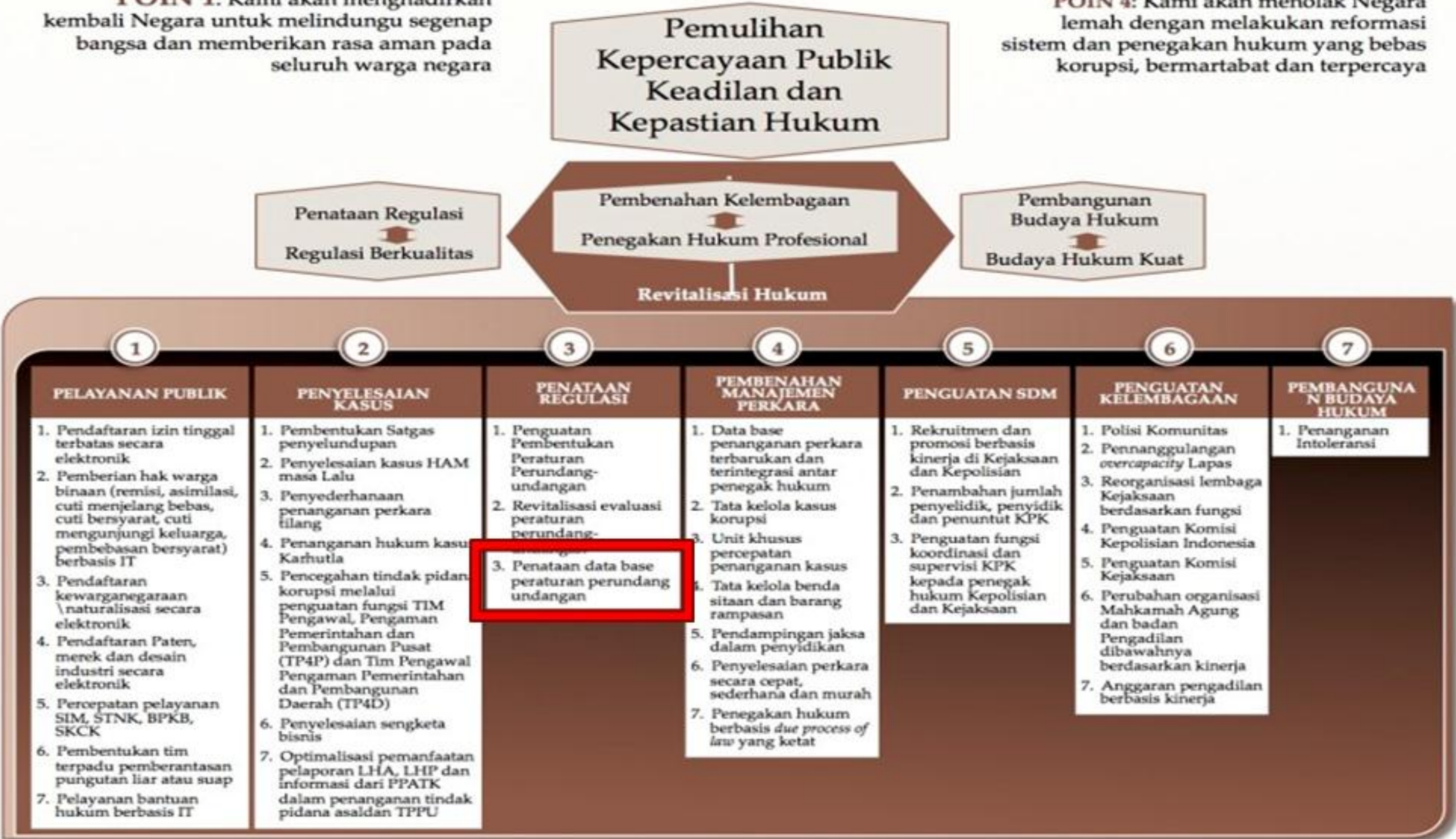
REFORMASI HUKUM
Jilid II
Agenda Penataan Regulasi

Revitalisasi dan Reformasi Hukum berdasarkan Nawacita

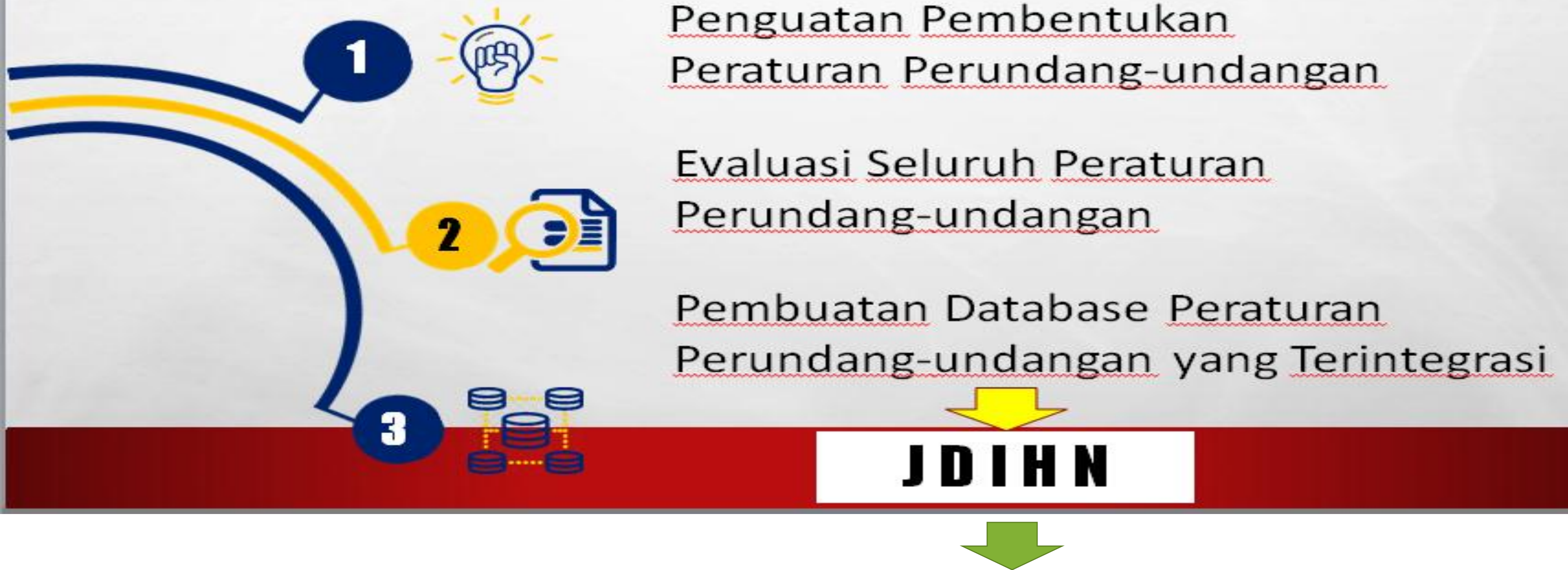
Program revitalisasi hukum menjadi agenda strategis berikut dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

POIN 1: Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara

POIN 4: Kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya



Agenda Penataan Regulasi



Tugas besar dan tanggung jawab semua Kementerian, Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah.

AGENDA 2: DATA BASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERINTEGRASI



Sumber : Bappenas RI



ORGANISASI JDIHN

PUSAT JDIHN



bphn

Badan Pembinaan Hukum Nasional

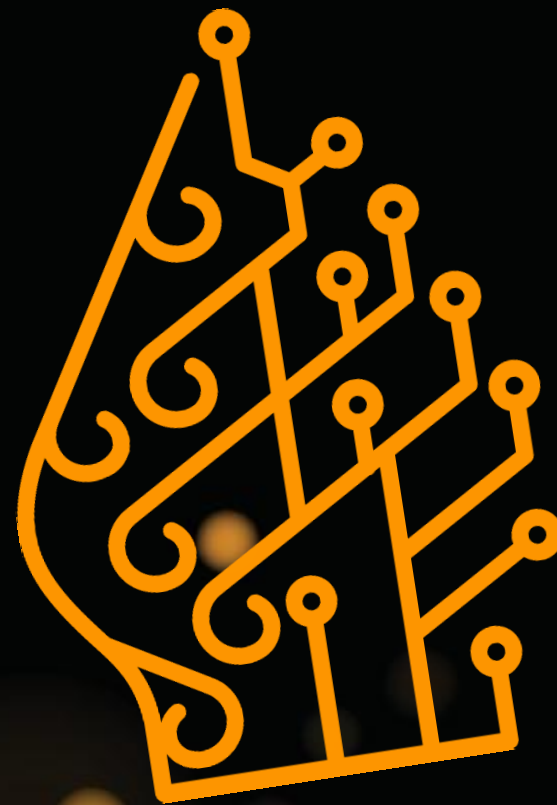
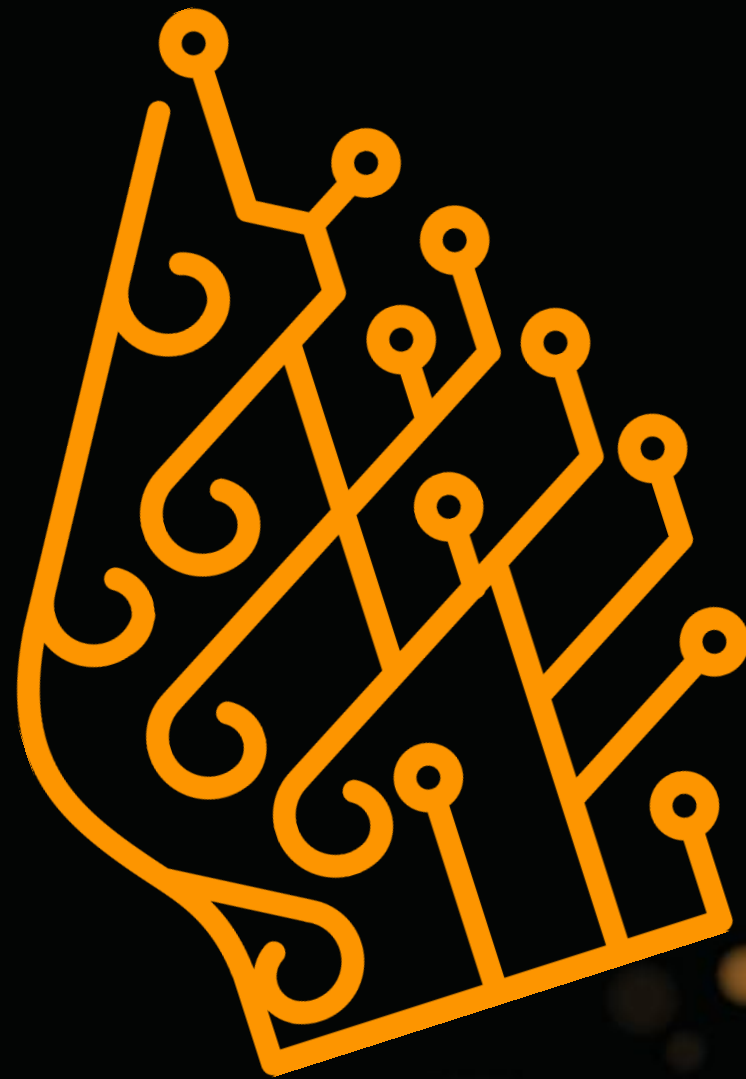
Kementerian Hukum dan HAM

Republik Indonesia

ANGGOTA JDIHN

- Kementerian Negara
- Sekretariat Lembaga Negara
- Lembaga Pemerintahan Non Kementerian
- Pemerintah Provinsi
- Pemerintah Kabupaten/Kota
- DPRD Provinsi Dan Kab/Kota
- Perpustakaan Hukum Pada PTN dan PTS
- Lembaga lain yg ditetapkan oleh Menteri

3. URGENSITAS JDIH





Mencari dokumen hukum ?



Google



HUKUM
ONLINE
.COM

peraturan.go.id

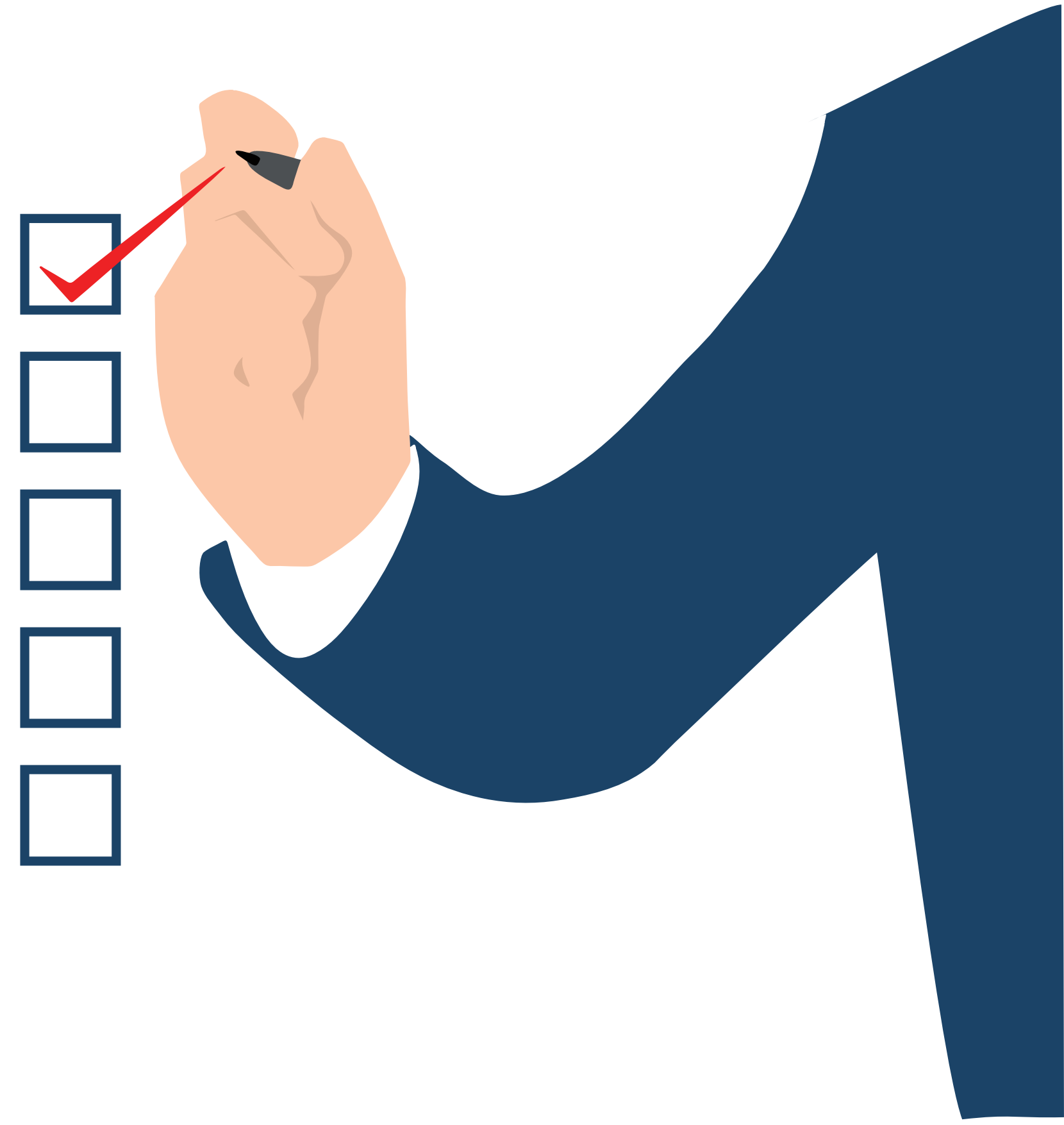
eCLIS.id



WIKIPEDIA

TUJUAN JDIHN

- ✓ Terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasikan di berbagai instansi pemerintah
- ✓ Menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap.
- ✓ Mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta sesama anggota jaringan guna penyediaan dokumen dan informasi hukum.



JDIH DALAM PENILAIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN



SPBE

indikator ke 44
"Tingkat Kematangan
JDIH"

Peraturan Menpan RB
Nomor 59 Tahun 2020
tentang Pemantauan dan
Evaluasi Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik



INDEKS REFORMASI HUKUM

Indikator
**"Penataan Database
Peraturan Perundang-
Undangan"**

Peraturan Menteri Hukum HAM
Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Penilaian Indeks Reformasi Hukum
pada Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah



Satu Data Indonesia

**Mendukung
Integrasi Satu
Data Indonesia**

Peraturan Presiden
Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data
Indonesia

4. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JDIIH PROVINSI JAWA TENGAH MENUJU SATU DATA HUKUM NASIONAL



Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah

**BAGAN STRUKTU JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROVINSI JAWA TENGAH**



Tugas Pusat JDIH Provinsi

1 pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

2 pelayanan hukum berbasis elektronik terintegrasi

3 pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada anggota JDIH di wilayah Provinsi



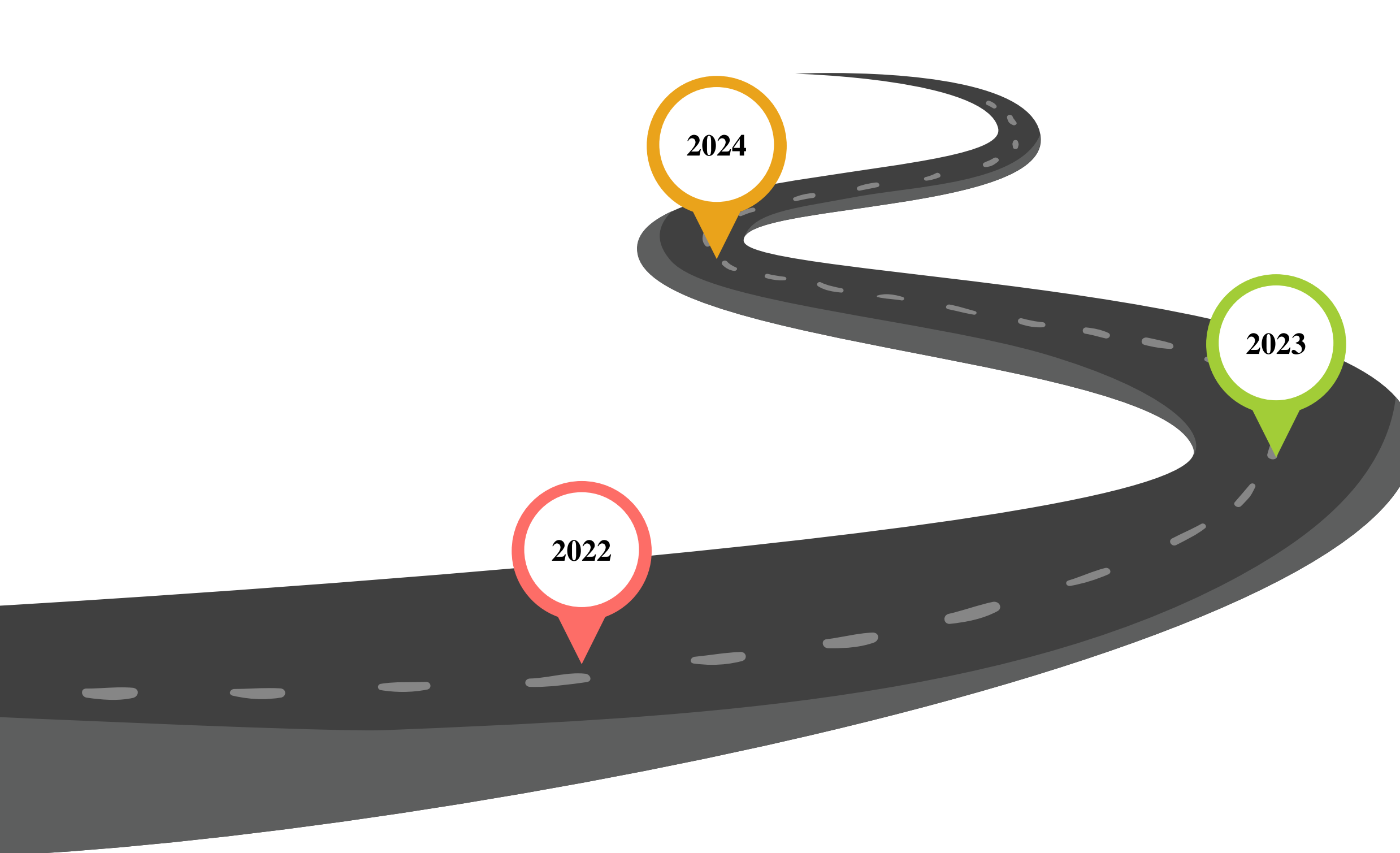
“Diharapkan JDIH dapat menjadi wadah informasi dan dokumentasi Produk Hukum yang dapat diakses Masyarakat dengan mudah, tidak hanya Produk Hukum Provinsi dan Kab/Kota, tetapi juga **Produk Hukum Desa**”

SUMARNO, SE, MM

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



Roadmap Pengembangan JDIH Provinsi Jawa Tengah



● **2024**

- Pengintegrasian Produk Hukum Desa di Seluruh Provinsi Jawa Tengah
- Optimalisasi Media Sosial sebagai media penginformasian dan pendokumentasian Hukum

● **2023**

Pemeriksaan Produk Hukum Provinsi yang terinformasikan (Keputusan Gubernur dan Produk Hukum OPD)

● **2022**

- Facelift website JDIH Provinsi Jawa Tengah
- Pengintegrasian Layanan Hukum dalam satu portal JDIH

5. PENGELOLAAN JDIH DESA DALAM MENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK DIGITAL YANG RESPONSIF





Selamat Datang di JDIH Kabupaten Batang

Silahkan cari peraturan yang kamu inginkan di bawah ini :

 Cari

[Pencarian Detail](#)



Peraturan Bupati

499 Dokumen



Keputusan Bupati

367 Dokumen



Instruksi Bupati

4 Dokumen



Rancangan Peraturan Daerah

13 Dokumen

KELOMPOK BIDANG

Daftar kelompok bidang sesuai keterkaitan dengan produk hukum



Pendidikan



Keuangan



Pariwisata



Kearsipan



Kesehatan



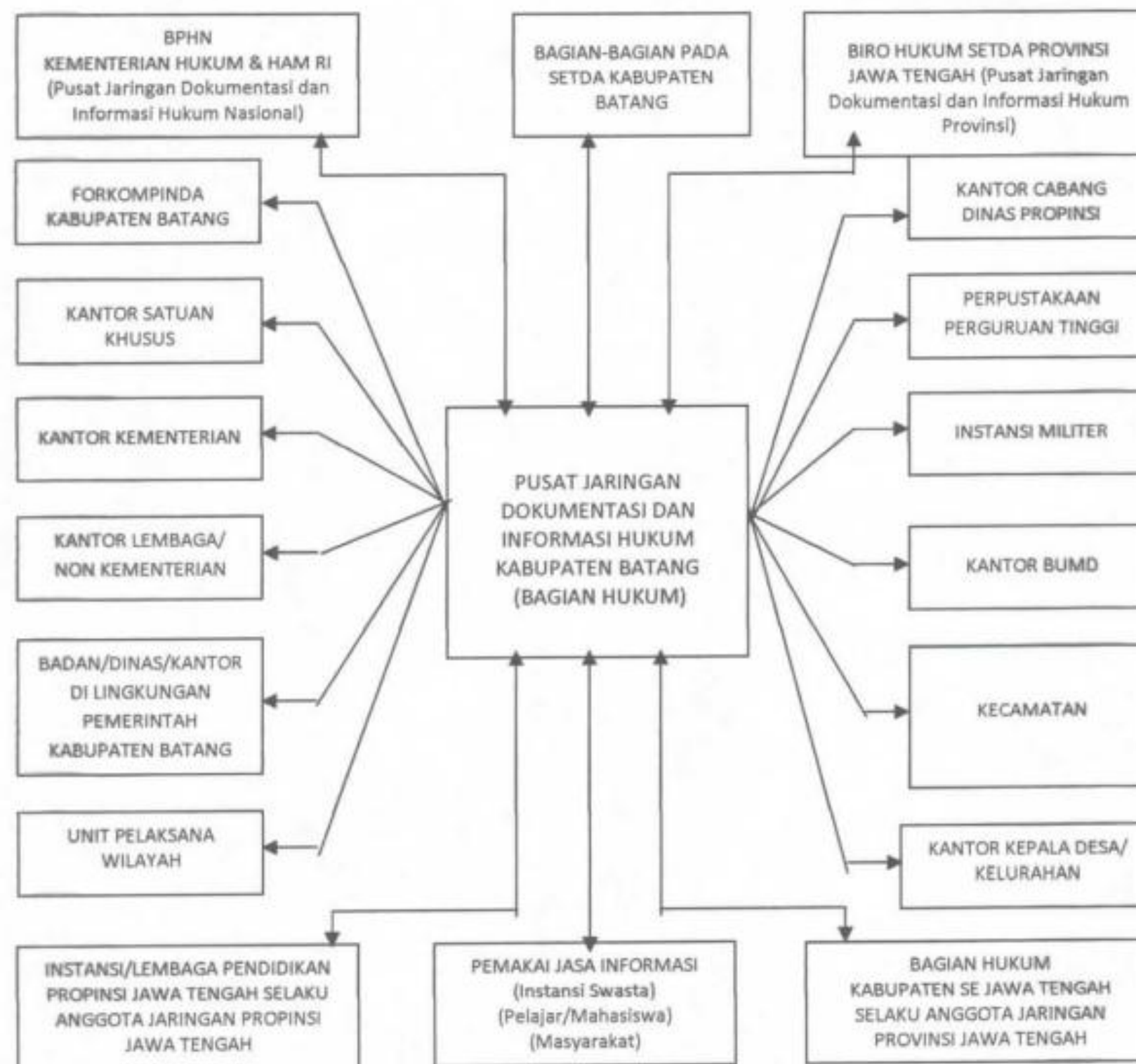
Infrastruktur



<https://jdih.batangkab.go.id/>



BAGAN ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BATANG



KETERANGAN :



: Garis hubungan timbal balik/ kerja sama

TUGAS PUSAT JDIH KAB/KOTA

1

Menyelenggarakan Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum

2

Membina Sumber Daya Manusia pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum

3

Menyediakan sistem informasi hukum yang berbasis teknologi informasi dan diintegrasikan dengan website JDIHN

4

Menyediakan sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum

FUNGSI PUSAT JDIH KAB/KOTA

Pusat Informasi Hukum

Pusat Penyimpanan dan
pengolahan dokumentasi
hukum secara manual dan
digital

Media koordinasi dan
konsultasi dengan anggota
jaringan

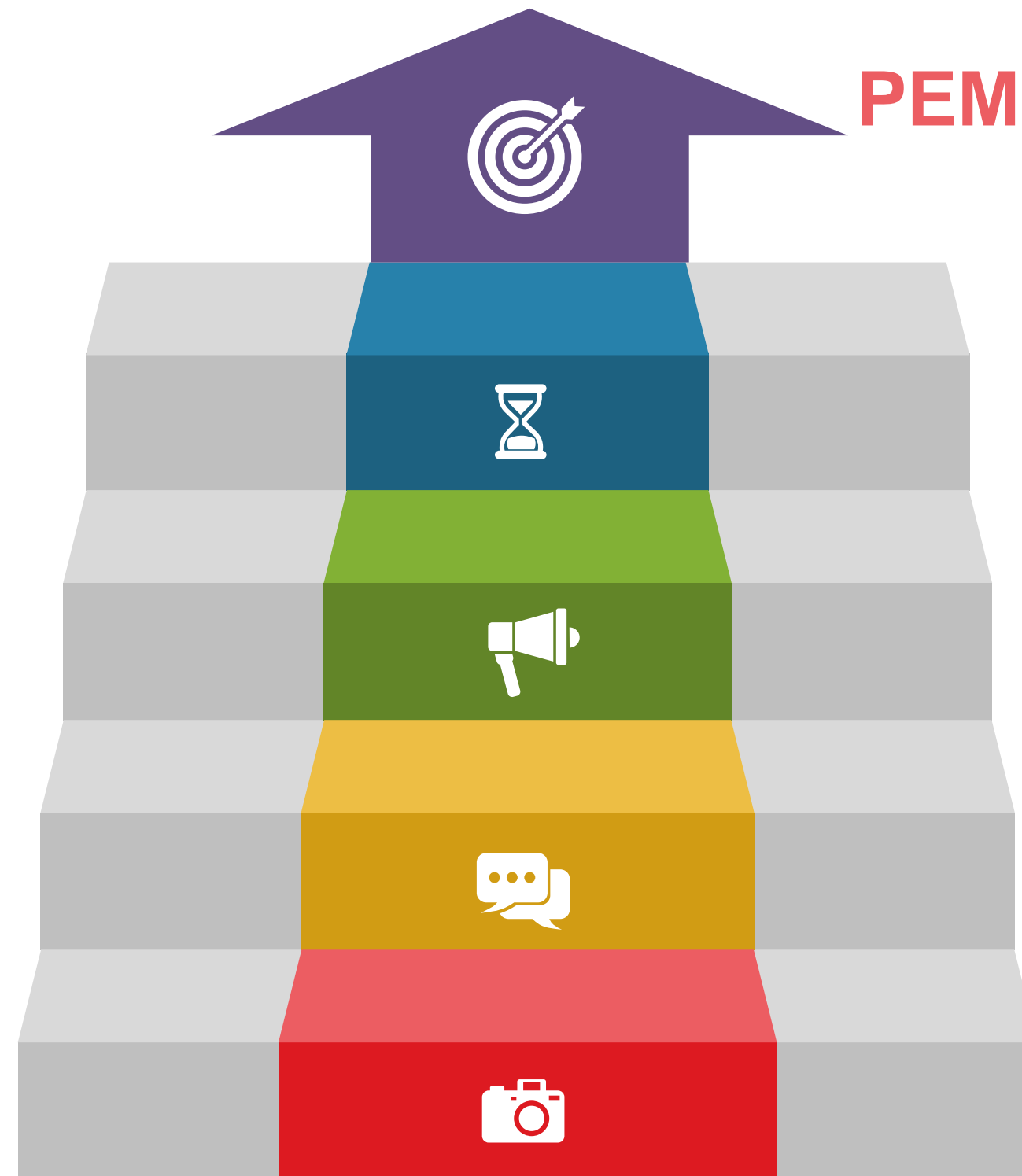
PENGELOLAAN JDIH KABUPATEN BATANG YANG RESPONSIF MELAYANI MASYARAKAT

SINERGITAS PUSAT JDIH DAN ANGGOTA JDIH

PERAN AKTIF DAN KOLABORASI ANTARA PUSAT JDIH DAN ANGGOTA JDIH & OPD TERKAIT (DISKOMINFO DAN DINPERMASDES)

KOORDINASI/KONSULTASI

KOORDINASI DAN KONSULTASI DENGAN PUSAT JDIH PROVINSI DAN KANWIL HUKUM DAN HAM DALAM PENGEMBANGAN JDIH.



PEMBINAAN ANGGOTA JDIH

SUMBER DAYA MANUSIA

PEMENUHAN SDM PENGELOLA JDIH BAIK PADA PUSAT JDIH MAUPUN ANGGOTA JDIH

SARANA DAN PRASARANA

PEMENUHAN SARANA DOKUMENTASI DOKUMEN HUKUM SECARA FISIK DAN ELEKTRONIK, MELALUI SINERGITAS DENGAN DISKOMINFO

PEMBINAAN BAGIAN HUKUM SELAKU PUSAT JDIH KABUPATEN BATANG

VALIDASI DOKUMEN HUKUM

Validasi Produk Hukum yang dihasilkan Desa sebelum diinformasikan kepada masyarakat, untuk mengecek keabsahan dan kesesuaian isi dari Produk Hukum

METADATA DOKUMEN HUKUM

Penyesuaian metadata produk hukum yang diupload kedalam website JDIH sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum

Integrasi JDIH

Hyperlink ke website JDIH Kabupaten Batang

PENGELOLAAN JDIH DI DESA

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

Pasal 69:

Desa diberi kewenangan untuk membentuk regulasi meliputi peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa

Pasal 86 :

Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

Permendagri 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

Bagian Keenam
Penyebarluasan

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

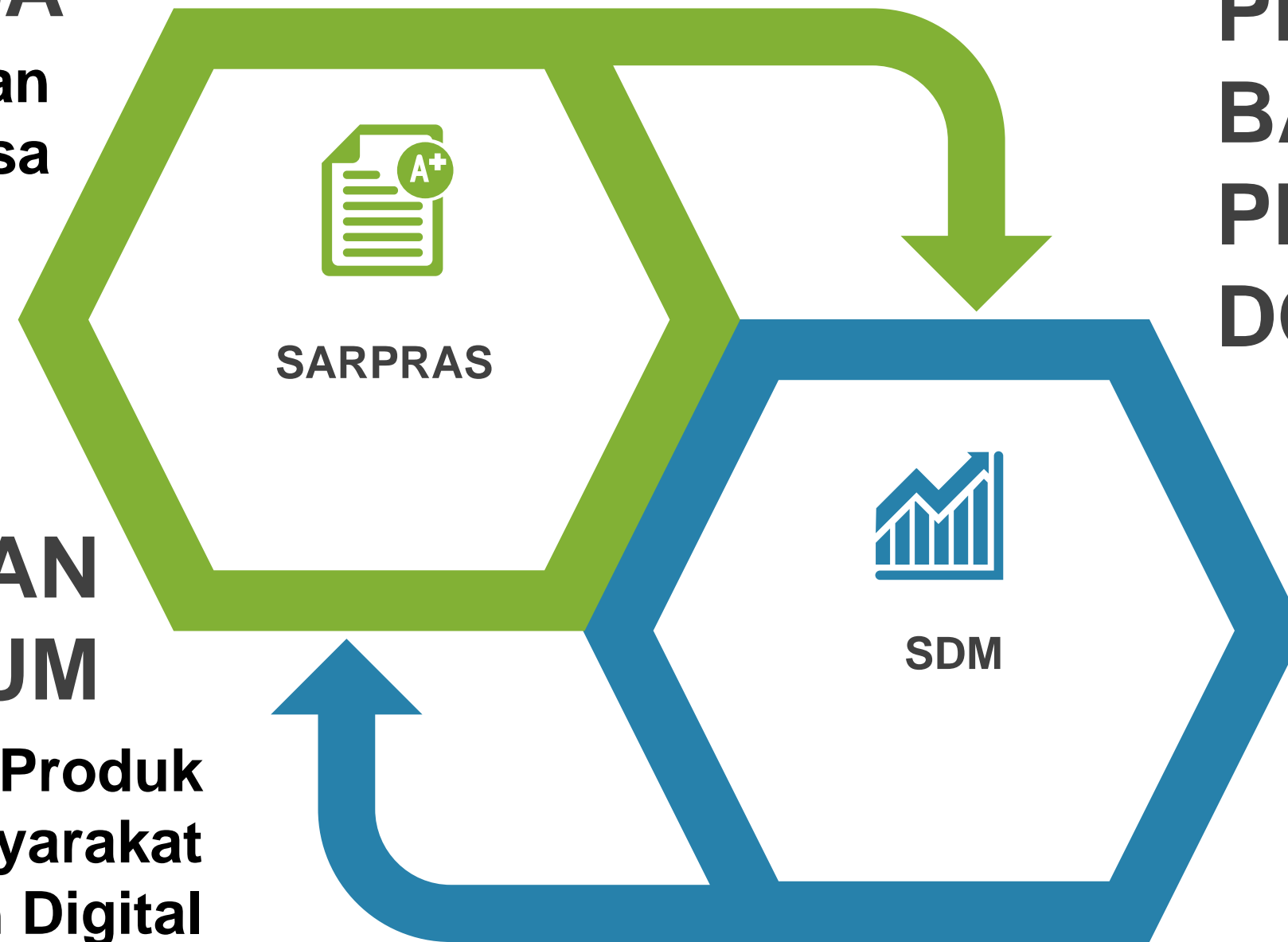
KEWAJIBAN DESA SEBAGAI ANGGOTA JDIIH

PEMENUHAN SARPRAS JDIIH DESA

Pembuatan Pojok JDIIH dan
Literasi Desa, website desa

PENYEBARLUASAN DOKUMEN HUKUM

Penyebarluasan Produk
Hukum Pada Masyarakat
Secara Manual Dan Digital
(Upload Di Website JDIIH Dan
Pengarsipan Fisik Dokumen)



PENGUMPULAN BAHAN DAN PENGELOLAAN DOKUMEN HUKUM

Pengumpulan Bahan
Dokumen Hukum &
Pengelolaan Dokumen
Hukum Secara Manual
dan Digital
Dilengkapi dengan
METADATA

APA YANG HARUS ADA DI JDIH DESA



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, peraturan bersama Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa, Kerjasama Desa

MONOGRAFI HUKUM

Rancangan Peraturan Desa, buku buku desa


ARTIKEL HUKUM

Artikel tentang Hukum



Bahasa : 

 Buku Tamu

 Login



[Beranda](#) [Tentang Kami](#) [Produk Hukum Desa](#) [Produk Hukum](#) [Dokumen Lainnya](#) [Informasi](#) [Download](#) [Koleksi Buku](#)

Produk Hukum Desa

Total data: **36 Produk Hukum Desa**




Peraturan Desa

Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2023

 Plumbon - Kec. Limpung  Ditetapkan : 23 Februari 2023

Tentang Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDES Tahun Anggrata 2022

Berlaku

 Download

 Lihat Detail



Surat Keputusan Kepala Desa

Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 141/6/II/2023 Tahun 2023

 Plumbon - Kec. Limpung  Ditetapkan : 22 Februari 2023

Tentang Petugas Operatos Desa Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Soial Desa Plumbon

Berlaku

 Download

 Lihat Detail




Surat Keputusan Kepala Desa

Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 141.1/03/2023 Tahun 2023

 Plumbon - Kec. Limpung  Ditetapkan : 06 Februari 2023

Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2023

 Cari

KATEGORI

Peraturan Daerah **186**

Peraturan Bupati **499**

Keputusan Bupati **367**

Instruksi Bupati **4**

Rancangan Peraturan Daerah **13**

Rancangan Peraturan Bupati **46**

Abstrak Peraturan Daerah **85**

Naskah Akademis **19**

MOU dan PKS **10**

Staatsblad **2**

Peraturan Desa **331**





☎ 085227215652 | ✉ balaidesa11@gmail.com

📍 Kabupaten Batang



Desa Plumbon
Kabupaten Batang

PROFIL DESA ▾

PEMERINTAHAN ▾

LAYANAN

INFORMASI ▾

POTENSI DESA

PRODUK HUKUM

🏠 / Produk Hukum

Produk Hukum

Title	Penjelasan	Download
KEPUTUSAN KEPALA DESA NO. 783/01P/I/2020 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA	PENUNJUKAN OPERATOR SISKEUDES DESA PLUMBON	Download
KEPUTUSAN KEPALA DESA NO. 5 TAHUN 2020 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA	PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA PLUMBON	Download
PERDES NO 5a TAHUN 2020 PERATURAN DESA	TENTANG PEMENFAATAN ASET DESA	Download
KEP. KEPALA DESA NO. 1D/2020 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA	Pengangkatan Ketua RT 2020-2025	Download
KEP. KEPALA DESA NO. 188.4/1B/I/2018 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA	Kep. kepala Desa No 188.4/1b/I/2019 Tentang Pembentukan Tim Intensifikasi PBB Tahun 2020	Download
KEP. KEPALA DESA NO. 411.6/06B/III/2018 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA	Kep. Kepala Desa No. 411.6/06B/III/2018 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil pekerjaan (PPHP) tahun 2019	Download
KEP. KEPALA DESA NO. 411.6/06A/III/2018 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA	Kep. Kepala Desa No. 411.6/06A/III/2018 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Tahun 2019	Download
KEP. KEPALA DESA NO. 411.6/06D/III/2018 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA	KEP. Kepala Desa No. 411.6/06D/III/2018 Tentang Pemberian Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2019	Download
KEP. KEPALA DESA NO. 11A TAHUN 2020 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA	KEP. KEPALA DESA NO. 11A TAHUN 2020 Tentang Pembentukan Satgas Jogo Tonggo Pencegahan COVID 19 Tahun 2020	Download
PERKADES NO 6 TAHUN 2018 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA	PERKADES NO. 6 TAHAUN 2018 Tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2019	Download
KEPUTUSAN KEPALA DESA NO. 270/2/2018 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA	Keputusan Kepala Desa No. 270/2/2018 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Pada Pemilu tahun 2019	Download
KEPUTUSAN KEPALA DESA NO. 910/01B/KEP/2018 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA	Keputusan Kepala Desa Plumbon No. 910/01b/KEP/2018 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran Dan PTTKD Desa Plumbon	Download



*Ngayemi lan
Nglayani*

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



@birohukumprovjateng <https://jdih.jatengprov.go.id/>

Matur Nuwun